

## Kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mata Mahasiswa

**Ahmad Khumaedi**  
Universitas Padjajaran

**Slamet Mulyana**  
Universitas Padjajaran

**Teddy Kurnia Wirakusumah**  
Universitas Padjajaran

Korespondensi penulis: [ahmad19021@mail.unpad.ac.id](mailto:ahmad19021@mail.unpad.ac.id)\*

**Abstract.** *Nowaday there is widespread coverage in the mass media regarding one of the institutions tasked with enforcing the law in the country of Indonesia related to cases of law violations committed by its own members, namely the Indonesian National Police. The police whose duty is to protect, protect and serve the community in carrying out their work must be directed to the community they serve so that their work can run well. However, the fact is that there are many cases of law violations committed by unscrupulous members of the police as well as the abuse of the functions and duties of the Police which have been regulated in the law which directly tarnishes the name of the Police tasked with protecting, nurturing and serving the community. Purpose: This research aims to determine the level of trustworthiness, expertise, and attractiveness of the Police in the eyes of students. Method: The method in this study is a quantitative descriptive methods. The data uses primary data through the distribution of questionnaires and literature studies such as books, journals and literature sources. Results: There are three aspects examined in source credibility, namely trustworthiness, expertise and attractiveness. The interval scale of the trustworthiness aspect is at a low level of trust where the dominant respondent who answered 54.72%. A total of 51.18% of respondents considered that the expertise aspect fell into a high category.. Regarding the attractiveness aspect of Polri, 61.02% of respondents considered that this aspect of Polri's attractiveness was in the moderate category.*

**Keywords:** *Credibility; Police; Law Enforcement Agencies; Student Views*

**Abstrak.** Saat ini maraknya pemberitaan di media massa mengenai salah satu lembaga yang bertugas menegakkan hukum di negara Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya sendiri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada masyarakat yang dilayani agar tugasnya dapat berjalan dengan baik. Namun, faktanya banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian serta penyelewengan fungsi dan tugas Polri yang telah diatur dalam Undang-undang yang secara langsung mencoreng nama Polri sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan, keahlian, dan daya tarik Polri sebagai lembaga penegak hukum di mata mahasiswa. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner dan data pendukung data primer melalui studi pustaka seperti buku, jurnal dan sumber literatur. Hasil : Aspek yang diteliti dalam kredibilitas sumber terdapat tiga aspek yaitu kepercayaan, keahlian dan daya tarik. Skala interval aspek kepercayaan ada pada tingkat kepercayaan yang rendah yang mana dominan responden yang menjawab 54,72%. Sebanyak 51,18% responden menilai bahwa aspek keahlian masuk dalam kategori yang tinggi. Pada aspek daya tarik, sebanyak 61,02% responden menilai bahwa aspek daya tarik Polri ini masuk ke dalam kategori sedang.

**Kata Kunci:** Kredibilitas; Kepolisian; Lembaga Penegak Hukum ; Pandangan Mahasiswa

## LATAR BELAKANG

Media massa memiliki peran yang besar pada perkembangan kebudayaan dan perubahan pola tingkah laku di kehidupan masyarakat. McQuail (1987) mengatakan media massa sebagai salah satu sarana perkembangan budaya, tidak hanya budaya dalam arti seni dan simbol melainkan juga dalam arti pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma (Prasetyo, 2016). Pengaruh dari media dalam mengubah kebudayaan dan pola pikir manusia pun semakin besar diikuti dengan semakin mudahnya informasi diakses oleh khalayak melalui media. Sudut padangan khalayak terhadap seseorang, kelompok, lembaga, atau institusi dapat dengan mudah berubah setelah menerima informasi secara terus menerus melalui media massa.

Saat ini sedang maraknya pemberitaan di media massa mengenai salah satu lembaga yang bertugas menegakkan hukum di negara Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya sendiri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri sendiri merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga negara menurut Hans Kelsen (1946) merupakan siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (Huda, 2020). Dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengemban tugas tersebut. keamanan dalam negeri merupakan hal yang patut untuk diutamakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 menjelaskan fungsi Polri dalam pemerintahan negara sendiri berada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kedamaian dan keamanan akan dapat dirasakan oleh masyarakat negara jika segala bentuk pelanggaran yang menyalahi norma hukum dapat ditindak dengan baik. Sebagai lembaga penegak hukum, sudah sepantasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Kepolisian yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada masyarakat yang dilayani agar tugasnya dapat berjalan dengan baik. Namun, faktanya banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian serta penyelewengan fungsi dan tugas Polri yang telah diatur dalam Undang-undang yang secara langsung mencoreng nama Polri sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kasus-kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian meliputi kasus pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran pidana. Data dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengatakan bahwa selama Januari hingga Oktober 2021, terdapat 1.694 kasus pelanggaran disiplin, 803 kasus pelanggaran kode etik, dan 147 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian (Tirto.id, 2022). Di tahun 2022 satu kasus yang melibatkan petinggi kepolisian hangat diperbincangkan di seluruh media yaitu kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Polri yang ditempati oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Kasus tersebut bergulir cukup lama di media hingga pada akhirnya ditetapkan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Kekecewaan masyarakat terhadap kasus pelanggaran hukum oleh oknum kepolisian dan lambatnya respon kepolisian dalam menindak laporan masyarakat dapat dilihat dari ramainya cuitan di media sosial Twitter dengan tagar #SatuHariSatuOknum dan #PercumaLaporPolisi yang mendapat lebih dari 7.000 cuitan dengan tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter pada bulan Desember 2021 (Tirto.id, 2022). Data menunjukkan bahwa persentase masyarakat Indonesia yang melaporkan kasus kriminal ke polisi setiap tahunnya rendah. Badan Pusat Statistik mempublikasikan laporan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020 persentase penduduk Indonesia yang melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke polisi tak lebih dari 25% (Katadata.co.id, 2021).

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, hal ini penting untuk diteliti dikarenakan Polri sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat sudah seharusnya mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Pemikiran mahasiswa dibutuhkan dalam konteks perubahan dan perbaikan sistem kehidupan bernegara yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterpercayaan, keahlian, dan daya tarik Polri sebagai lembaga penegak hukum di mata mahasiswa.

## **KAJIAN TEORETIS**

### **Teori Kredibilitas Sumber**

Dalam teori ini diasumsikan bahwa efektivitas dari suatu komunikasi sangat bergantung pada siapa yang menyampaikannya. Efektivitas pesan terkadang dapat dibedakan dari bagaimana publik memandang komunikator. Individu cenderung untuk menerima sebuah informasi bergantung pada seberapa baik informasi dan kepercayaannya terhadap komunikator (Hovland et al., 1953). Dengan kata lain, seseorang akan lebih mudah untuk dipersuasi jika

seseorang yang menyampaikan pesan dianggap cukup kredibel. Tiga aspek yang mampu memengaruhi kredibilitas sumber, yakni keterpercayaan (*trustworthiness*), keahlian (*expertise*), dan daya tarik (*attractiveness*) (Venus, 2018).

### **Fungsi dan Tugas Polri**

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 2 tahun 2002 merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian secara langsung diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 2 tahun 2022 yang mencakup fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Implementasi dalam rangka pelayanan publik instansi kepolisian yang menjalankan fungsi utama dalam pelaksanaan penegakan hukum harus tetap mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan Nomor: 63/Kep/M/Pan/2003) tentang Standar Pelayanan Publik. Sehubungan dengan itu, manajemen Polri tidak dapat dilepaskan dari keharusan terciptanya *good governance* dalam kepolisian, yang sudah menjadi kategori umum yaitu keterlibatan masyarakat (*participation*), transparansi berdasarkan kebebasan memperoleh informasi (*transparency*), dan tanggung jawab kepada publik (*accountability*) (Mardiasmo, 2004). Selain itu, Polri juga memiliki tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Kode Etik Kepolisian**

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan norma atau aturan yang tertulis serta tidak tertulis yang menjadi acuan sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Menkopolhukam No. 7 tahun 2022 yang meliputi empat kelompok sikap moral (Kemenko Polhukam, 2022), yaitu:

1. Etika Kenegaraan, yang merupakan sikap moral anggota Polri terhadap landasan, konstitusional, dan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan profesi Polri.
3. Etika Kemasyarakatan, yang merupakan pedoman sikap dan perilaku setiap anggota Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.
4. Etika Kepribadian, yang adalah pedoman bersikap dan berperilaku setiap anggota Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki landasan filsafat positivistik yang di dalamnya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2016). Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan observasi secara sistematis yang memiliki tujuan, dapat direplikasi, dan absah untuk mempelajari perilaku manusia dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif cenderung berusaha menggeneralisasi perilaku manusia dengan dengan menguantifikasi perilaku tersebut. pendekatan kuantitatif memberikan batasan yang jelas mengenai kedalaman atau keluasan variabel-variabel yang diteliti melalui operasionalisasi variabel. Angka dan simbol statistik yang digunakan pada pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengomunikasikan temuan penelitian melalui bahasa yang universal sehingga perbedaan interpretasi makna hasil penelitian dapat terhindari (Rakhmat & Ibrahim, 2017). Pada umumnya penelitian kuantitatif mengambil data dari sampel yang acak untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2016). Sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, pendekatan kuantitatif memandang fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan memiliki hubungan gejala bersifat sebab akibat. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang menggunakan sebuah instrumen penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data. Proses penelitian pada pendekatan kuantitatif bersifat deduktif dengan menggunakan konsep atau teori untuk menjawab rumusan masalah. Data yang telah

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta, bukan menguji hipotesis. Penelitian deskriptif berusaha mencari pola sederhana berdasarkan pada konsep tertentu sehingga peneliti yang menggunakan survei deskriptif mengedepankan konsep rujukan dalam mengukur suatu fenomena (Bajari, 2017). Metode deskriptif merupakan metode yang berupaya mendeskripsikan secara akurat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu fenomena yang ada hubungannya antara satu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam analisis data lapangan, metode penelitian deskriptif menggunakan analisis statistik deskriptif yang mengacu pada ukuran kecenderungan pusat, bukan analisis statistik inferensial.

Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner atau angket ke beberapa sampel dari populasi. Kuesioner menurut Sugiyono (2016) adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016). Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara serta studi pustaka pada literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang dapat mendukung data penelitian ini.

Sugiyono (2016) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di Kota Bandung dan Jatinangor yang mengikuti dan menandai akun instagram penerimaan mahasiswa baru universitas. Alasan dipilihnya mahasiswa baru sebagai populasi dalam penelitian ini karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang berintelektual dan memiliki kepedulian dan kritisme yang tinggi atas berbagai permasalahan sosial politik yang berkembang. Pemikiran mahasiswa dibutuhkan dalam konteks perubahan dan perbaikan sistem kehidupan bernegara yang lebih baik (Kemenko PMK, 2022). Terlebih mahasiswa baru merupakan masyarakat yang baru saja memasuki fase baru dari siswa menjadi mahasiswa yang diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu yang berkaitan dengan sosial politik. Dalam konteks ini, memahami bagaimana pandangan mahasiswa atas suatu permasalahan juga menjadi suatu hal yang diperlukan, termasuk bagaimana mereka memandang kredibilitas Polri. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis *nonprobability sampling* dengan teknik *accidental*

*sampling*. Pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* dilakukan peneliti pada periode tertentu yaitu pada bulan Januari hingga Maret 2023. Sampel diambil sebanyak 254 orang untuk menjadi responden dari total populasi. Dalam analisis data dilakukan dengan teknik analisis univariat yang merupakan teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri, tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis univariat diperlukan untuk menggambarkan secara deskriptif pandangan responden terhadap kredibilitas Polri yang disajikan dengan skala interval.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Karakteristik Responden

Penelitian yang dilakukan pada Januari-Juni 2023 ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan 57,88% atau 147 mahasiswa dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 42,12% atau 107 mahasiswa. Responden paling banyak berasal dari Institut Teknologi Bandung (44,90%), kemudian Universitas Padjadjaran (30,70%), Universitas Pendidikan Indonesia (20,10%), dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (4,30%). Berdasarkan rumpun keilmuannya responden terdiri dari rumpun soshum sebanyak 50,79% dan saintek sebanyak 49,21%.

#### Temuan Keahlian Polri di Mata Mahasiswa

**Tabel 1. Tingkat Keahlian Polri di Mata Mahasiswa**

<b>Keahlian</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Tinggi	130	51,18%
Sedang	101	39,76%
Rendah	23	9,06%
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan distribusi skala interval terhadap variabel keahlian Polri sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai keahlian polisi sebagai lembaga penegak hukum cenderung masuk ke dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 130 responden (51,18%). Selanjutnya ada pada kategori sedang yaitu sebanyak 101 responden (39,76%), dan pada kategori rendah sebanyak 23 responden (9,06%). Terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur keahlian Polri yaitu pengetahuan, kecerdasan, pengalaman, kewenangan, dan *skill* yang dapat diandalkan.

Dari hasil tabel di atas dapat dikatakan bahwa mahasiswa menilai keahlian yang dimiliki Polri berkisar pada opini yang baik. Tingginya tingkat keahlian Polri di mata

mahasiswa berarti mahasiswa memiliki pandangan yang baik pada indikator pengetahuan, kecerdasan, pengalaman, kewenangan, dan *skill* yang dimiliki oleh anggota Polri. Indikator yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah indikator pengetahuan dengan 62,20% responden menilai pengetahuan Polri pada kategori tinggi. Indikator lain yang mendapatkan penilaian yang baik juga adalah indikator pengalaman Polri dengan 54,73% responden menilai Polri memiliki pengalaman yang baik dalam menangani kasus hukum.

### Temuan Keterpercayaan Polri di Mata Mahasiswa

**Tabel 2. Tingkat Keterpercayaan Polri di Mata Mahasiswa**

<b>Keterpercayaan</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Tinggi	27	10,63%
Sedang	88	34,65%
Rendah	139	54,72%
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai keterpercayaan polisi di mata mahasiswa cenderung masuk ke dalam kategori rendah yaitu sebanyak 140 responden (55,12%). Selanjutnya ada pada kategori sedang yaitu sebanyak 85 responden (33,46%), kategori tinggi 29 responden (11,42%). Hal ini menandakan bahwa pandangan mahasiswa mengenai keterpercayaan Polri sebagai lembaga penegak hukum berada pada opini kurang baik. Dari hasil temuan tersebut dapat dikatakan responden menilai bahwa di dalam diri setiap anggota Polri kurang memiliki nilai nilai moral yang dapat meningkatkan keterpercayaan, yaitu nilai tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, integritas pribadi, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Terdapat enam indikator yang digunakan untuk mengukur keterpercayaan Polri yaitu ketulusan, kejujuran, objektivitas, integritas pribadi, sikap bijak dan adil, serta tanggung jawab sosial.

Dari keenam indikator tersebut, seluruhnya mendapatkan pandangan pada kategori rendah dari mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Indikator yang dinilai paling buruk adalah pada indikator kejujuran anggota Polri dengan total 62,20% responden menilai Polri memiliki nilai kejujuran yang rendah. Indikator kejujuran Polri berkaitan dengan keterbukaan akan informasi dan polisi yang dapat dipercaya perkataannya. Indikator berikutnya yang dinilai paling rendah adalah sikap bijak dan adil anggota Polri dengan hasil 60,24%. Dari hasil rendahnya tingkat keterpercayaan Polri di mata mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa memandang Polri kurang memiliki nilai nilai moral yang dapat meningkatkan keterpercayaan,



yaitu nilai tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, integritas pribadi, serta tanggung jawab sosial sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

### Temuan Daya Tarik Polri di Mata Mahasiswa

**Tabel 3. Tingkat Daya Tarik Polri di Mata Mahasiswa**

<b>Daya Tarik</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tinggi	61	24,02%
Sedang	155	61,02%
Rendah	38	14,96%
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai daya tarik polisi di mata mahasiswa cenderung masuk ke dalam kategori sedang yaitu sebanyak 155 responden (61,02%). Selanjutnya ada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 61 responden (24,02%) dan kategori rendah 38 responden (14,96%). Dari hasil temuan tersebut dapat dikatakan bahwa responden menilai Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki daya tarik yang sedang atau menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh responden yang menilai daya tarik fisik yang dimiliki oleh Polri cenderung tinggi, namun responden menilai daya tarik psikologi Polri yang cenderung rendah. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat daya tarik Polri sebagai lembaga penegak hukum yaitu daya tarik fisik dan daya tarik psikologis. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa daya tarik yang dimiliki Polri sebagai lembaga penegak hukum belum cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Khususnya pada indikator daya tarik psikologis dikarenakan penilaian daya tarik fisik dapat dikatakan cukup baik dilihat dari banyaknya responden yang menilai daya tarik fisik Polri pada kategori tinggi. Sedangkan pada daya tarik psikologis dominan responden menilai daya tarik psikologi pada kategori rendah.

### PEMBAHASAN

Kredibilitas merupakan persepsi komunikasi mengenai sifat-sifat komunikator. Efektivitas dari suatu komunikasi sangat bergantung pada siapa yang menyampaikannya. Penerimaan seseorang terhadap sebuah pesan tergantung pada kredibilitas sumber yang mengirimkan pesan tersebut. Semakin tinggi kredibilitas komunikator, semakin besar pula kemampuan komunikator tersebut dalam memengaruhi khalayak (Rakhmat, 2016). Mahasiswa mendapatkan informasi mengenai Polri tidak hanya dari sumber media massa, tetapi juga dari pengalaman dan hasil pemikirannya yang kritis. Citra kredibilitas akan terbentuk di dalam diri

responden mahasiswa, dan akan menentukan bagaimana mereka memandang, bertindak laku, dan merespon keberadaan Polri.

Dari tigabelas indikator kredibilitas Polri yang terbagi menjadi enam indikator dimensi keterpercayaan, lima indikator dimensi keahlian, dan dua indikator dimensi daya tarik menghasilkan skor pengamatan yang beragam. Pada dimensi keahlian yang dibagi menjadi lima indikator yaitu pengetahuan, kecerdasan, pengalaman, kewenangan, dan skill yang dapat diandalkan dapat disimpulkan Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki keahlian yang tinggi. Hasil interval yang positif tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung setuju Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan sarana penunjang pelayanan masyarakat, memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan kasus hukum, berpengalaman dalam menegakkan hukum, melaksanakan kewenangan dengan baik, dan memiliki skill yang dapat diandalkan. Kesan yang baik melekat bahwa Polri telah memanfaatkan teknologi dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Polri telah meluncurkan aplikasi PRESISI Polri yang dapat mengakomodir seluruh layanan Polri untuk masyarakat secara daring mulai dari mengurus pajak kendaraan, SIM, mengurus izin keperluan masyarakat, informasi Polri, serta panggilan 110, dan lain-lain (Polri.go.id, 2022). Selain itu, mahasiswa juga memberikan penilaian yang baik terkait pengalaman Polri dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Keahlian dan kompetensi yang tinggi dari Polri dapat menjadi aspek yang amat bermanfaat untuk mendukung peningkatan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum. Keahlian yang didapat melalui pengalaman Polri dalam mengungkap kasus-kasus besar seperti terorisme menunjukkan keahlian Polri sudah sangat baik. Keahlian yang baik tersebut juga digunakan dengan baik akan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Keahlian sangat berpengaruh pada kredibilitas komunikator di mata khalayak. Jika khalayak memandang komunikator sebagai orang yang ahli, maka khalayak akan cenderung bersedia mendengarkan, mempelajari, dan menerima isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya, jika komunikator dilihat sebagai orang yang tidak memiliki keahlian, maka khalayak akan dengan mudah mengabaikan pesan yang disampaikan komunikator (Venus, 2018). Dalam hal ini, keahlian Polri sebagai lembaga penegak hukum yang dinilai baik oleh masyarakat akan berdampak baik pada patuhnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada dimensi keterpercayaan, ternyata mahasiswa memandang keterpercayaan Polri sebagai lembaga dengan fungsi utama penegak hukum pada penilaian yang cenderung buruk. Artinya mahasiswa menilai bahwa di dalam diri setiap anggota Polri kurang memiliki nilai-nilai moral yang dapat meningkatkan keterpercayaan, yaitu nilai tulus, jujur, bijak dan adil, objektif,

integritas pribadi, serta tanggung jawab sosial. Padahal Polri memiliki Kode Etik Profesi Polri yang berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri. Pada Kode Etik Profesi Polri terdapat Etika Kepribadian yang merupakan norma-norma pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya. Rendahnya keterpercayaan masyarakat dapat menandakan bahwa setiap pejabat polri belum sepenuhnya menanamkan norma-norma kode etik profesi Polri dalam pribadi masing-masing.

Faktor dari rendahnya penilaian masyarakat terhadap keterpercayaan Polri sebagai lembaga penegak hukum dapat berasal dari penilaian atas perilaku anggota Polri di masa lalu serta bayangan atas perilakunya pada saat ini. Venus menjelaskan bahwa track record seseorang akan menjadi patokan apakah yang bersangkutan memiliki keterpercayaan atau tidak (Venus, 2018). Indikator yang mendapat penilaian paling rendah ada pada indikator kejujuran Polri. Dalam hal ini berarti mahasiswa menilai bahwa Polri kurang bisa dipercaya perkataannya dan tidak transparan kepada masyarakat. Transparansi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan lembaga negara. Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjelaskan transparansi merupakan asas yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan pemerintahan dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap hak individu, kelompok, dan rahasia negara.

Transparansi akan berpengaruh pada akuntabilitas lembaga Polri sendiri yang mana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas proses dan hasil akhir penyelenggaraan negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Kemendo Polhukam, 1999). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas yang selaras akan menciptakan *good governance* di dalam Polri berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut akan menjadi dasar terwujudnya *good policing* yang didasarkan pada tiga pilar utama tersebut.

Terwujudnya *good policing* atau kepolisian yang baik adalah usaha untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, pemberian layanan yang demokratis dan tidak diskriminatif, serta adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam semua tugas dan implementasi kerja Polri. Banyaknya berita di media mengenai kasus yang melibatkan anggota Polri mampu untuk menjadi faktor yang menurunkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Banyak berita di media massa yang mengabarkan kasus korupsi, kolusi, dan

nepotisme di tubuh Polri, bahkan dilakukan oleh petinggi Polri. Seperti kasus Irjen Pol Djoko Susilo yang tersangkut kasus korupsi pengadaan simulator SIM sebesar 32 miliar pada tahun 2013 silam (Kompas.com, 2021).

Tidak hanya faktor berita di media massa saja, tetapi penilaian yang rendah terhadap keterpercayaan Polri juga bisa disebabkan oleh pengalaman pribadi responden. Rakhmat menyebutkan bahwa terdapat hal-hal yang memengaruhi persepsi khalayak tentang komunikator yang disebut sebagai *prior ethos*. Gambaran mengenai komunikator dapat terbentuk dari pengalaman langsung dengan komunikator atau dari pengalaman wakilan seperti mendengar dari berita di media massa (Rakhmat, 2016).

Dalam dimensi daya tarik yang dibagi menjadi dua indikator yaitu daya tarik fisik dan daya tarik psikologis dapat disimpulkan bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki daya tarik yang sedang. Pada hasil interval penelitian sebanyak 61,02% responden memiliki pandangan yang sedang pada daya tarik Polri sebagai lembaga penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik yang dimiliki Polri sebagai lembaga penegak hukum belum cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Khususnya pada indikator daya tarik psikologis. Hal tersebut dikarenakan dari interval indikator yang didapatkan, penilaian daya tarik fisik dapat dikatakan cukup baik dilihat dari banyaknya responden yang menilai daya tarik fisik Polri pada kategori tinggi. Sedangkan pada daya tarik psikologis dominan responden menilai daya tarik psikologi pada kategori rendah. Daya tarik fisik dapat mempengaruhi persepsi khalayak terhadap komunikator. Orang dengan daya tarik fisik yang tinggi secara sosial lebih mendapat perhatian, lebih dihargai, dan lebih diterima. Mereka juga cenderung mendapatkan umpan balik yang positif pada setiap interaksi yang dilakukan (Venus, 2018). Sedangkan daya tarik psikologis didasarkan pada kesamaan nilai atau karakteristik kepribadian tertentu. Kesamaan antara komunikator dan khalayak mampu meningkatkan daya tarik yang membuat upaya persuasi menjadi lebih efektif (Venus, 2018).

Kredibilitas merupakan persepsi yang dimiliki komunikan terhadap komunikator. Sehingga kredibilitas yang dimiliki Polri merupakan sebuah persepsi yang dimiliki oleh masyarakat. Tinggi rendahnya kredibilitas Polri merupakan opini masyarakat yang artinya apa yang mereka lihat, baca, dengar dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman masyarakatlah yang menjadi dasar penilaian. Berita yang muncul di media massa dapat memengaruhi opini masyarakat sesuai dengan konstruksi berita tersebut. Bahkan di era media sosial saat ini muncul kelompok masyarakat konsumsi yang disebutkan oleh Handaningtias (2022) sebagai masyarakat yang hanya senang menyebarluaskan berita saja. Masyarakat yang sebelumnya membentuk opini dari pengalaman secara langsung terhadap realitasnya, kini masyarakat dapat

memiliki pengalaman berdasarkan pengalaman orang lain yang dibacanya melalui media sosial ataupun media massa. Contoh konkritnya adalah tagar Percumalaporpolisi yang menjadi trending di media sosial twitter.

Tagar ini menjadi hasil dari opini masyarakat yang melalui proses kreasi dan re-kreasi secara berulang melalui media sosial dimana masyarakat tidak perlu merasakan kejadian yang sama, mereka dapat sekadar merasakan simpati atau memiliki pendapat yang sama, atau sekelompok orang yang memiliki rasa tidak suka pada kepolisian dapat turut serta dalam menyebarkan isi konten dan teks dari tagar tersebut. Sebuah tagar kini tidak boleh dianggap hanya sebagai kumpulan huruf yang dibuat untuk mencapai algoritma tertentu saja, melainkan pengaruh sebuah tagar dapat menghasilkan gambaran pengalaman manusia terhadap realitas serta bagaimana hubungannya dengan manusia lainnya, dalam hal ini adalah kepercayaan publik terhadap Polri baik secara individu maupun institusi.

## **KESIMPULAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan tingkat keahlian yang tinggi di mata mahasiswa Kota Bandung dan Jatinangor. Hasil interval yang positif tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menilai Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan sarana penunjang pelayanan masyarakat, memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan kasus hukum, berpengalaman dalam menegakkan hukum, melaksanakan kewenangan dengan baik, dan memiliki skill yang dapat diandalkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan tingkat keterpercayaan yang rendah di mata mahasiswa Kota Bandung dan Jatinangor. Khususnya terkait dengan kejujuran, integritas, dan sikap bijak dan adil Polri. Rendahnya keterpercayaan dapat menggambarkan mahasiswa menilai bahwa di dalam diri setiap anggota Polri kurang memiliki nilai nilai moral yang dapat meningkatkan keterpercayaan, yaitu nilai tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, integritas pribadi, serta tanggung jawab sosial. sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan tingkat daya tarik yang sedang di mata mahasiswa Kota Bandung dan Jatinangor. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik fisik dan daya tarik psikologis yang dimiliki Polri sebagai lembaga penegak hukum belum cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Khususnya pada indikator daya tarik psikologis yang mendapatkan penilaian yang cukup rendah dibandingkan dengan indikator daya tarik fisik.

## DAFTAR REFERENSI

- Bajari, A. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren, dan Etika*.
- Hovland, C., Janis, I., & Kelley, H. (1953). *Communication and Persuasion*. Yale University Press.
- Huda, U. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. PT. Refika Aditama. Katadata.co.id. (2021). 76,54% Korban Kejahatan Tidak Melaporkan ke Polisi pada 2020. Www.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/7654-korban-kejahatan-tidak-melaporkan-ke-polisi-pada-2020>
- Kemenko PMK. (2022). *Mahasiswa Harus Memiliki Skill Berpikir Kritis*. Kemenkopmk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/mahasiswa-harus-memiliki-skill-berpikir-kritis>
- Kemenko Polhukam. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, 1, 1–5*.
- Kemenko Polhukam. (2022). Perpolri No. 7 Tahun 2022. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan No. 7 Tahun 2022, 597(2), 10–17*.
- Kompas.com. (2021). *Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK*. Www.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/11300341/perjalanan-kasus-terpidana-korupsi-simulator-sim-djoko-susilo-dari-vonis>
- Mardiasmo, M. B. A. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Polri.go.id. (2022). *Aplikasi Presisi*. Www.Polri.Go.Id. <https://polri.go.id/presisi#:~:text=PRESENSI Polri adalah kebutuhan akan, layanan dari hulu hingga hilir.>
- Prasetyo, I. (2016). Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan. *Jurnal Komunikasi Untar*, 8(2), 159–169. <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/61>
- Rakhmat, J. (2016). *Psikologi Komunikasi* (T. Surjaman (ed.)). Rosda.
- Rakhmat, J., & Ibrahim, I. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Simbiosis.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tirto.id. (2022). *Membedah Citra Polri Lewat Tagar #PercumaLaporPolisi*. Www.Tirto.Id. <https://tirto.id/membedah-citra-polri-lewat-tagar-percuma-lapor-polisi-gni7>
- Venus, A. (2018). *Manajemen Kampanye* (R. Soenendar (ed.); Edisi Revi). Simbiosis.